

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pariwisata berasal dari dua kata yaitu *Pari* dan *Wisata*. *Pari* dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan *Wisata* dapat diartikan sebagai perjalanan atau berpergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata "*reavel*" dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu maka kata "*pariwisata*" dapat juga diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "*Tour*" (Yoeti, 1991:103). . Pariwisata merupakan hasil karya manusia. Kegiatan pariwisata tentunya tidak dapat berkembang dengan sendirinya tanpa adanya komunitas lokal sebagai penggerak utamanya. Komunitas lokal yang dimaksud adalah masyarakat asli yang berperan dalam menciptakan dan mengembangkan pariwisata dalam suatu wilayah tertentu sebagai destinasi pariwisata. Sebagaimana dijelaskan oleh Murphy dalam Purnamasari (2011:51) kegiatan pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berbasis komunitas, bahwa sumber daya dan keunikan yang dimiliki oleh komunitas lokal menjadi faktor penggerak utama dalam kegiatan pariwisata tersebut. Pengelolaan pariwisata yang diupayakan oleh komunitas lokal yaitu berupa pengelolaan fisik dan non fisik. Pengelolaan fisik ditandai dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengelolaan tempat, objek dan benda-benda secara langsung, sedangkan pengelolaan non fisik berupa tradisi dan budaya yang dihadirkan oleh masyarakat terhadap kegiatan pariwisata tersebut.

Dalam pengelolaan pariwisata peran pemangku kepentingan serta masyarakat itu sangat penting karena dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat maka proses pengelolaan juga akan berjalan dengan baik dan lancar dan tentunya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta sebagai pendukung keberhasilan pariwisata. Salah satu konsep yang menjelaskan peranan masyarakat dalam proses pengelolaan pariwisata adalah pariwisata berbasis masyarakat atau *community-based-tourism* (CBT). Dikeluarkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberi kesempatan yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. Akibatnya setiap pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian daerahnya. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah pariwisata membuat sebuah program yaitu Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community-Based-Tourisme) yang mana program ini dapat diterapkan oleh seluruh daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pariwisata dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dalam suatu daerah.

Konsep pariwisata berbasis masyarakat ini adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan. Kegiatan kepariwisataan ini diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sebagai manfaat yang dihasilkan dari proses pengelolaan suatu tempat wisata. Menurut Hudson dan Timothy dalam Sunaryo (2013:139) mengatakan pariwisata berbasis masyarakat

atau *community-based-tourism* merupakan melibatkan masyarakat dengan kepastian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat melalui upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal, serta kelompok lain yang memiliki antusias atau minat kepada kepariwisataan, dengan pengelolaan pariwisata yang memberi peluang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. Manfaat lain yang diperoleh dari penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat ini adalah perlindungan terhadap lingkungan akan lebih baik dan terjaga, terjadinya peningkatan pendapatan yang diperoleh dari keuntungan pengelolaan pariwisata, serta perlindungan terhadap kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat.

Proses pengelolaan pariwisata melibatkan peran dari beberapa *stakeholders* sebagai faktor terpenting kesuksesan sebuah pariwisata. Adapun beberapa *stakeholders* tersebut adalah yang pertama, peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pariwisata. masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam pengelolaan tempat wisata, sebab masyarakat sendirilah yang akan merumuskan serta melaksanakan pengelolaan tersebut. Kedua, peran pemerintah sebagai fasilitator. Ketiga, peran swasta sebagai investor (Rizkianto & Topowijono, 2018:20).

Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat sudah banyak dilakukan salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2017) dengan judul Pengelolaan Pariwisata Alam Berbasis Masyarakat (Kasus Objek Wisata Alam Rammang-Rammang Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan). Strategi pengelolaan wisata

alam Rammang-rammang berbasis masyarakat ini sepenuhnya dikelola oleh masyarakat lokal dengan guna untuk meningkatkan sumber daya manusia dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Pengelolaan dan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang secara langsung memberdayakan masyarakat lokal melalui adaptasi lingkungan dengan memanfaatkan potensi alam. Pengelolaan pariwisata Rammang-rammang yang dilakukan oleh masyarakat lokal ini memperoleh peningkatan ekonomi bagi masyarakat.

Berkaitan dengan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, Wisata Pemandian Alam Batang Tabik termasuk dalam pengelolaan yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya, meskipun sampai saat ini program Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) ini belum ada diterapkan pada pariwisata yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tetapi adapun bentuk pengelolaannya itu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wisatanya atau sudah mengacu kepada program pariwisata berbasis masyarakat. Wisata Pemandian Alam Batang Tabik terletak di Nagari Sungai Kamuyang, Nagari Sungai Kamuyang terletak di Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota berjarak lima km dari pusat Kota Payakumbuh. Berdasarkan data yang di dapat dari *website* Kecamatan Luak, Nagari Sungai Kamuyang disebut nagari terluas yang ada di Kecamatan Luak dengan luas 30,37 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 tercatat sebanyak 7.295 jiwa, dengan rincian penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 3.610 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 3.685 jiwa (<http://kec-luak.limapuluhkotakab.go.id/statis-63-nagarisungaikamuyang.html>).

Nagari Sungai Kamuyang terdiri dari 9 jorong diantaranya Jorong Batang Tabik, VI Kampung, VIII Kampung, XII Kampung, Rageh, Madang Kadok, Subaladuang, Tabiang, dan Jorong Tanjung Kaliang. Sungai Kamuyang memiliki tingkat kesuburan yang bagus sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan perkebunan dan pertanian. Tanaman yang ditanam berupa ubi-ubian, jagung, coklat, palawija dan lain sebagainya. Tidak hanya dimanfaatkan sebagai kegiatan perkebunan dan pertanian. Potensi ekonomi yang dimiliki Nagari Sungai Kamuyang juga beragam yaitu berupa usaha perikanan dan usaha peternakan di antaranya beternak sapi, kerbau, bebek, ayam dan lain sebagainya.

Aktivitas masyarakat Nagari Sungai Kamuyang kental dengan nilai keagamaan yang dianut dalam kehidupan sehari-hari terlihat dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang dilakukan seperti pengajian, ceramah agama serta perlombaan di bulan Ramadhan yang diadakan setiap tahunnya seperti MTQ, Pildacil, dan cerdas cermat. Kegiatan lain yang dilakukan masyarakat dalam upaya membangun Nagari Sungai Kamuyang terlihat dari aktivitas organisasi kepemudaan dan masyarakat setempat yang bergotong royong dalam mengelola Wisata Pemandian Alam Batang Tabik. Organisasi Kepemudaan di bawah naungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang diatur dalam Peraturan Nagari No. 2 Tahun 2003 tentang pengelolaan Pemandian Batang Tabik. Dalam melibatkan peran aktif masyarakat Sungai Kamuyang, pemerintah nagari memberikan kesempatan kepada organisasi pemuda yang ada pada setiap jorong untuk terlibat dalam pengelolaan Pemandian Batang Tabik. Pengelolaan dilakukan secara bergiliran setiap tahunnya oleh setiap jorong dengan cara diundi.

Dalam sejarah pengelolaan Wisata Batang Tabik resmi dijadikan sebagai tempat wisata pada tahun 1954 dengan pengelolaan pertama dilakukan oleh salah seorang masyarakat, pemerintahan Nagari memberi kepercayaan kepada salah satu tokoh masyarakat berpengaruh untuk mengelola Pemandian Batang Tabik, tetapi proses pengelolaan tersebut dianggap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. karena adanya konflik yang terjadi pada waktu itu pengelolaan dihentikan. Dari konflik tersebut pengelolaan Pemandian Batang Tabik diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 bahwa pengelolaan Pemandian Batang Tabik diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) (<http://kecuak.limapuluhkotakab.go.id/statis-63-nagarisungaikamuyang.html>). Selanjutnya Wisata Pemandian Alam Batang Tabik tersebut kembali dikelola pada tahun 1979 oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pada masa pengelolaan oleh KAN juga tidak berjalan dengan baik dikarenakan tidak adanya transparansi uang yang dibuat oleh KAN kepada Pemerintahan Nagari yang menyebabkan pengelolaan beralih kepada Nagari.

Kawasan Pemandian Alam Batang Tabik terdiri dari 3 kolam renang diantaranya 2 kolam diperuntukkan untuk orang dewasa dan 1 lagi untuk anak-anak. Kolam renang dewasa kedalaman kolamnya mulai dari 1,5 m – 7 m dan kedalaman kolam renang anak-anak  $\pm$  1.5 m. Sumber air Pemandian Batang Tabik ini berasal dari Gunung Sago dengan air yang jernih sehingga pada zaman dahulunya Pemandian Batang Tabik ini digunakan oleh masyarakat sekitar untuk konsumsi rumah tangga sehari-hari seperti mencuci pakaian dan untuk minum. Tidak hanya dimanfaatkan sebagai kebutuhan rumah tangga saja sumber air

tersebut juga digunakan untuk pengairan sawah masyarakat, tempat pemandian umum (MCK), serta tempat rekreasi bagi masyarakat sekitar.

Sejak dibangunnya PDAM Kota Payakumbuh tahun 1975, Pemandian Batang Tabik tidak hanya untuk kebutuhan masyarakat lokal saja melainkan ini juga dimanfaatkan untuk distribusi air yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Payakumbuh untuk kebutuhan masyarakat kota Payakumbuh. Pihak Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah Kota Payakumbuh mengadakan perjanjian dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Kamuyang yang dalam perjanjiannya tertulis pendistribusian air maksimal 60 (enam puluh) liter/detik dari debit air dan selebihnya diperuntukan dalam irigasi persawahan dan untuk kawasan wisata.

Namun perjanjian tersebut tidak berjalan sesuai harapan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang. Rabu, 16 Januari 2019 telah terjadi pemutusan sumber air yang dilakukan oleh sekelompok warga sungai kamuyang terhadap pemanfaatan sumber air PDAM Kota Payakumbuh. Persoalan tersebut berawal dari ketidakpuasan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang terhadap sosialisasi perjanjian kerjasama pemanfaatan sumber mata air Batang Tabik oleh Pemkab Lima Puluh Kota. Riza Falepi selaku Walikota Kota Payakumbuh menegaskan jika persoalan tersebut tidak segera dituntaskan maka beliau tidak segan-segan untuk memberhentikan seluruh pegawai PDAM yang berasal dari Nagari Sungai Kamuyang. Beliau juga memerintahkan Herry Iswahyudi selaku Direktur PDAM untuk melaporkan tindakan pidana terkait perusakan sarana PDAM oleh oknum

masyarakat tersebut kepada pihak kepolisian (<http://www.topsatu.com/konflik-pdam-vs-sungai-kamuyang-air-kembali-diputus/>).

Dalam perkembangannya masyarakat dan pemerintah tidak menyadari bahwa pengelolaan pariwisata tanpa memperhatikan aspek sosial dan budaya akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kearifan lokal masyarakat itu sendiri. Menurut Soewarno Handyaningrat (1997:9) pengelolaan diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Pariwisata dapat terselenggara dengan baik bila adanya kerja sama antara masyarakat lokal dan pemerintah. Kerjasama ini bersifat berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yaitu dengan tidak merusak kearifan lokal masyarakat itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pitana (2009:81) bahwa pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal.

Pengelolaan pariwisata Pemandian Alam Batang Tabik dikelola oleh Nagari Sungai Kamuyang yang berarti tidak masuk ke dalam Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh pihak nagari belum

dilakukan secara professional, karena seperti bentuk transparansi dana yang tidak dikemukakan dengan jelas yang menyebabkan adanya konflik penyelewengan dana yang dilakukan oleh pihak pengelola sendiri. Pemandian Alam Batang Tabik sebagai sumber perekonomian serta pemersatu masyarakat dalam hal pemeliharaan dan pemberdayaan lingkungan alam yang dimiliki Nagari sudah sepatutnya dikelola dengan cara yang baik yang mana pengelolaan yang dilakukan bersifat berkelanjutan dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat dengan mengambil Wisata Pemandian Alam Batang Tabik di Nagari Sungai Kamuyang, Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **B. Rumusan Masalah**

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan konsep yang mengedepankan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan suatu tempat yang berpotensi sebagai tempat wisata dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan meningkatkan perekonomian dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini peneliti melihat pengelolaan yang dilakukan oleh pihak nagari belum dilakukan secara professional, karena seperti bentuk transparansi dana yang tidak dikemukakan dengan jelas yang menyebabkan adanya konflik penyelewengan dana yang dilakukan oleh pihak pengelola sendiri. Tetapi justru hal tersebut sepertinya tidak menjadi masalah oleh pihak pengelola tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based-tourism*) pada wisata Pemandian Alam Batang Tabik ?
2. Apa dampak pengelolaan Wisata Pemandian Alam Batang Tabik terhadap organisasi masyarakat Nagari Sungai Kamuyang ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based-tourism*) pada wisata Pemandian Alam Batang Tabik.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak pengelolaan Wisata Pemandian Alam Batang Tabik terhadap organisasi masyarakat Nagari Sungai Kamuyang.

### D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi akademis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu antropologi mengenai pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based-tourism*) serta dampak pengelolaan wisata terhadap organisasi masyarakat Nagari Sungai Kamuyang.
2. Dari segi praktis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas para pembaca terhadap objek wisata yang ada di kawasan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. serta dapat memperkenalkan objek wisata ini hingga ke kancah dunia.

## E. Tinjauan Pustaka

Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini namun memiliki fokus yang berbeda.

*Pertama*, dalam skripsi yang ditulis oleh Dhanik Nor Palupi Rorah (2012) dengan judul *Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat (community-based-tourism) Di Desa Wisata Kebon Agung Kecamatan Imogiri*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di Desa Kebon Agung dilakukan secara langsung oleh masyarakat lokal melalui POKDARWIS. Desa wisata Kebon Agung telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan konservasi sumber daya alam dan peningkatan ekonomi melalui produk wisata yang berorientasi pada budaya lokal. Dalam pelaksanaan program desa wisata secara kuantitas jumlah masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan desa wisata masih sedikit. Pada tahap pelaksanaan tingkat partisipasi yang tergambar adalah tingkat kekuatan masyarakat karena masyarakat sendiri yang mengelola dan memutuskan bagaimana kegiatan wisata dijalankan. Masyarakat ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan serta terlibat dalam pengelolaan atraksi dan fasilitas pariwisata. Tidak hanya itu tingkat partisipasi masyarakat juga tergambar yaitu berupa sumbangan kritik dan saran untuk kemajuan pariwisata.

*Kedua*, dalam skripsi yang ditulis oleh Yona Adhani Abdillah (2016) yang berjudul *Pengelolaan Kawasan Wisata Pemandian Suban Air Panas. Studi Kasus : Kelurahan Talangulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*. Skripsi ini membahas tentang Sumber Daya Manusia diakui sebagai salah satu komponen penting dalam pembangunan pariwisata. Dimana

pariwisata yang ada memerlukan manusia untuk mengerakkannya. Sumber daya manusia sangat menentukan eksistensi pariwisata. Kawasan pemandian Suban Air Panas ini dikelola oleh dua actor yaitu, Pemerintah dan Masyarakat. Masyarakat disini adalah orang yang memiliki lahan di dalam kawasan wisata pemandian Suban Air Panas dan masih ada hubungan keluarga Luas. Semua tempat wisata yang bersifat pribadi memiliki hubungan keluarga. Pemilik lahan yang dijadikan lokasi wisata merupakan satu Poyang satu keturunan yang sama.

Kekuasaan lahan dipegang oleh keluarga luas. Kekuasaan penuh dan peran penting, berada pada keluarga dari pemilik lahan yang ada dikawasan wisata. Perbedaan pengelolaannya terdiri dari fasilitas karyawan, bangunan tempat wisata, juga dalam pembayaran karyawan pekerja. Disini terlihat budaya diantara pihak pengelola kawasan wisatawan ini berdampak pada kawasan wisata itu sendiri. Dimana nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing pihak pengelola berbeda seperti tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan keluarga atau pemilik lahan wisata. Pemerintah daerah tidak begitu memberi penegasan dan tidak begitu memperhatikan kawasan wisata ini karena anggaran dana yang ada tidak memungkinkan untuk membeli seluruh tanah yang ada dikawasan pemandian Suban Air Panas. Hingga sampai sekarang pemilik lahan yang ada dikawasan wisata dan pengelolaannya memiliki perbedaan dari sinilah menimbulkan keresahan bagi pengunjung. Sehingga masalah tersebut menimbulkan penurunan pengunjung tiap tahunnya. Bukan saja berdampak pada pengunjung tetapi juga bagi masyarakat disekitar kawasan wisata. Dimana masyarakat sekitar kawasan wisata tidak memperoleh penambahan ekonomi.

Dalam pengelolaan yang masih melibatkan keluarga ini terlihat bagaimana pihak-pihak keluarga besar saja yang memperoleh keuntungan dari pariwisata yang ada, sedangkan masyarakat sekitar tidak dilibatkan dalam pengelolaan kawasan wisata Pemandian Suban Air Panas ini.

*Ketiga*, dalam skripsi yang ditulis oleh Mauizatul Hasanah (2017) yang berjudul Pengelolaan Pariwisata Alam Berbasis Masyarakat (Kasus Objek Wisata Alam Rammang-Rammang Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan). Dalam skripsi ini membahas tentang strategi pengelolaan wisata alam Rammang-Rammang dalam segi pengelolaan yang berbasis masyarakat yang dipelopori oleh kelompok sadar wisata, dimana pengelolaan sepenuhnya dikelola oleh masyarakat lokal guna meningkatkan sumber daya manusia dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat yang dimana pengelolaan dan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Di dalam pengelolaan wisata alam Rammang-Rammang juga secara langsung memberdayakan masyarakat lokal melalui proses adaptasi lingkungan dengan memanfaatkan potensi wisata alam yang ramai dikunjungi wisatawan. Kendala nyata yang terjadi di objek wisata alam Rammang-Rammang ialah kesadaran masyarakat dalam hal menjaga lingkungan dan fasilitas wisata dan kurangnya anggaran dalam membangun sarana prasarana, karena objek wisata alam Rammang-Rammang murni dikelola oleh masyarakat lokal.

*Keempat*, dalam skripsi yang ditulis oleh Fahmi Muhammad (2015) yang berjudul Bentuk Pengelolaan Potensi Pariwisata Pantai Pangdaran Jawa Barat. Skripsi ini membahas tentang proses pengelolaan pariwisata serta dampak

pengelolaan pariwisata yang di Pantai Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Yang mana dari hasil penelitian di peroleh bentuk pengelolaan potensi pariwisata yang ada di Pantai Pangandaran menggunakan bentuk pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, yaitu masyarakat berperan penuh sebagai perencana, investor, pelaksana, pengelola, pemantau maupun evaluator dalam pengelolaan pariwisata.

*Kelima*, penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh Ni Luh Made Suryani dkk (2016) dari Universitas Udayana dengan judul Analisis Manajemen Pengelolaan Obyek Wisata Dalam Mewujudkan Pembangunan Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Badan Usaha Milik Desa Adat (BUMDA) (Studi Kasus Obyek Wisata Pantai Pandawa Kuta Selatan Kabupaten Badung). Penelitian ini membahas pengelolaan obyek wisata pantai pandawa yang mana menggunakan 3 fungsi manajemen diantaranya fungsi strategi, fungsi manajemen komponen internal dan fungsi manajemen konstituen eksternal. Ketiga fungsi tersebut masih ada yang lemah yaitu fungsi manajemen komponen internal yang mengarah pada masih kurang sumber daya manusia yang handal. Permasalahan tersebut menjadi pokok persoalan utama, sehingga untuk ke depannya para pihak akan lebih mencari SDM yang handal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta didukung oleh latar belakang pendidikannya. Pihak pengelola pantai pandawa menggunakan 3 indikator diantaranya lingkungan, produk wisata, dan kemitraan dan partisipasi masyarakat agar terwujudnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan menjadi acuan obyek wisata pantai pandawa untuk dapat terus eksis dalam dunia pariwisata.

*Keenam*, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yopi Yanto (2017) dari JOM FISIP Universitas Riau dengan judul Pengelolaan Objek Wisata Masjid Raya Pekanbaru Sebagai Destinasi Wisata Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini membahas pengelolaan objek wisata masjid raya Pekanbaru sebagai destinasi wisata kota Pekanbaru tidak berjalan dengan semestinya. Dikarenakan minimnya anggaran dana untuk pengelolaan. Dalam pelaksanaan pengelolaannya ada beberapa faktor yang menyebabkan lumpuhnya pengelolaan wisata ini. Diantaranya yang pertama faktor SDM yang tidak memadai. Jumlah petugas yang ditugaskan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya 2 orang. Kedua koordinasi yang tidak terjalin dengan baik dengan instansi terkait yang berhubungan dengan objek wisata masjid raya ini. Hal ini menyebabkan terjadinya kesalahan yang fatal yaitu dengan mrenovasi bangunan masjid raya yang sudah menjadi cagar budaya aslinya dan bentuknya tidak sesuai lagi dengan bentuk semula.

Berbeda dengan penelitian diatas dalam pengelolaan objek wisata yang akan penulis teliti terdapat perbedaan cara pengelolaan yang dilakukan oleh pihak pengelola dimana objek wisata ini dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan mempercayai organisasi pemuda sebagai pengelolanya. Adapun pemuda disini merupakan perwakilan dari masyarakat yaitu pemuda dalam setiap organisasi yang ada pada setiap jorong di Nagari Sungai Kamuyang.

## **F. Kerangka Konseptual**

Pariwisata berbasis masyarakat (*community-based-tourism*) adalah pengelolaan pariwisata dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dengan

tujuan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya. Anstrand (2006) mendefinisikan *community-based-tourism* (CBT) sebagai pariwisata yang memperhitungkan dan menempatkan keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya, di atur dan dimiliki oleh komunitas. Prinsip dasar pariwisata berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam kegiatan pariwisata yang mana manfaat dari kegiatan pariwisata sebesar-besarnya diperuntukkan untuk masyarakat.

Menurut Sunaryo (2013) prinsip pokok pariwisata berbasis masyarakat (*community-based-tourism*) yaitu :

- a. Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- b. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.
- c. Menjamin sustanbilitas lingkungan.
- d. Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik.

J.J. Honigmann dalam Koentjaraningrat (2009:150-151) membagi menjadi 3 wujud kebudayaan yaitu :

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya. Wujud yang pertama ini merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau di foto. Lokasinya terdapat didalam kepala atau pikiran manusia yaitu berupa ide dan gagasan. Ide dan gagasan inilah yang hidup bersama dalam suatu masyarakat dan memberikan jiwa kepada masyarakat tersebut. Gagasan tersebut berkaitan satu dengan yang lainnya

menjadi suatu sistem. Sistem inilah yang disebut oleh ahli antropologi sebagai sistem budaya atau *cultural system*.

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kedua ini disebut sistem sosial atau *social system*. Bersifat konkret terjadi pada kehidupan sehari-hari serta dapat diobservasi langsung ataupun didokumentasikan. Sistem ini terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan dan bergaul satu sama lain dari detik ke detik, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, selalu menurut pola-pola tertentu juga berdasarkan adat tata kelakuan.

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Merupakan seluruh hasil fisik, aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat. Sifatnya sangat konkret dan dapat diraba, dilihat, dan difoto. Contoh benda-benda yang canggih seperti teknologi yang diciptakan manusia dan lain sebagainya.

Ketiga wujud kebudayaan inilah yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kebudayaan dan adat istiadat memberikan arahan kepada manusia dalam berpikir dan bertindak sehingga menghasilkan kebudayaan fisik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Hal ini disebut sebagai nilai budaya yang merupakan konsep mengenai sesuatu yang ada dalam alam pikiran sebagian besar dari masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan masyarakat. Nilai budaya sudah tercantum dalam kehidupan masyarakat sejak mereka masih kecil sehingga telah berakar di dalam jiwa masyarakat. Nilai budaya ini tidak dapat dengan mudah hilang ataupun digantikan

dengan budaya yang lain dalam kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan nilai budaya yang ada di Minangkabau. Nilai inti dari adat Minangkabau sejak dahulunya masih dijunjung tinggi sampai seekarang oleh masyarakat Minangkabau sebagai *adat nan sabana adat*, yaitu adat yang tidak boleh diubah. Masyarakat minangkabau berpedoman kepada falsafah "*adat basandi syarak , syarak basandi kitabullah*" yang berarti adat yang didasarkan oleh syariat agama islam, syariat tersebut berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist. Falsafah inilah yang menjadi pedoman masyarakat minangkabau dalam melakukan sebuah tindakan serta memberikan arah dan berfungsi sebagai pedoman manusia berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat minangkabau juga berpedoman kepada alam, menjadikan alam sebagai pedoman hidup dalam melahirkan sebuah norma-norma yang didalamnya mengatur bagaimana manusia berpikir dan bertindak seperti yang tercantum dalam pepatah minangkabau *alam takambang jadi guru*.

Wujud dari kebudayaan yang juga dijelaskan oleh C. Kluckhohn dalam Koentjaraningrat (2009:285) yang dapat membentuk dan mempengaruhi kebudayaan masyarakat adalah organisasi sosial. Unsur budaya berupa organisasi sosial memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok atau komunitas sosial. Dalam sebuah organisasi sosial terdapat adat istiadat dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat mengenai macam kesatuan di dalam lingkungan tempat individu hidup dan bergaul dari hari ke hari. Organisasi sosial berisi aturan-aturan serta tindakan yang dilakukan untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Sama halnya dengan Nagari Sungai

Kamuyang. Di Nagari Sungai Kamuyang terdapat sebuah organisasi yang mana anggota organisasinya terdiri dari berbagai pemuda yang tersebar dari ke sembilan jorong yang ada di Nagari Sungai Kamuyang. Tujuan didirikannya organisasi pemuda ini adalah untuk mengelola Pemandian Alam Batang Tabik.

Guyer Freuler dalam Pendit (1999:38) menjelaskan pariwisata merupakan fenomena kebutuhan akan kesehatan dan pergantian suasana, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan khususnya bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil dari pada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan, serta penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009 pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa peran serta dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana.

Konsep pariwisata berbasis masyarakat (*community-based-tourism*) adalah konsep yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola pariwisata dengan manfaat keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pariwisata yang lebih adil bagi masyarakat lokal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sunaryo (2013:218) Masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan memiliki kedudukan dan peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan pariwisata. Konsep pariwisata berbasis masyarakat ini bertujuan untuk

memberikan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan serta melindungi kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Pariwisata berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan. Pemberdayaan pada dasarnya adalah persoalan kemiskinan. Atas dasar itulah masyarakat miskin tersebut harus diberdayakan sehingga diharapkan mampu mengembalikan keberfungsian sosial manusia secara umum dan menciptakan masyarakat yang mandiri. Pariwisata berbasis masyarakat ini juga akan memberdayakan masyarakat Nagari secara keseluruhan dengan pengelolaan yang melibatkan masyarakat lokal sehingga seluruh masyarakat Nagari mendapatkan manfaat atau keuntungan dari pengelolaan tersebut. Dijelaskan oleh Rappaport dalam Arifi (2017:5) Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang.

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menggunakan konsep pengelolaan dalam manajemen yang mana dijelaskan menurut Leiper dalam Pitana (2009:80) Pengelolaan (*manajemen*) merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Fungsi-fungsi *manajemen* tersebut antara lain : *Planning* (perencanaan), *Directing* (mengarahkan), *Organizing* (termasuk *Coordinating*), *Controlling* (pengawasan). Pariwisata dapat terwujud yaitu dengan adanya pengelolaan yang baik terhadap kawasan wisata tentunya dengan nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman bagi masyarakat nagari dalam

mengelola sebuah tempat wisatanya. Oleh karena itu sangat diperlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan di bidang pariwisata untuk mengintegrasikan kerangka pengelolaan pariwisata. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dimaksud adalah peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pariwisata, peran pemerintah sebagai fasilitator serta peran swasta sebagai investor. Seperti yang dijelaskan Bramwell dan Lane dalam Pitana (2009:87-88) ada beberapa manfaat yang bisa di ambil dari perlibatan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) ini yaitu :

1. Pelibatan beragam *stakeholders*, termasuk dari kepentingan non-ekonomi akan memperkuat pertimbangan dari sisi lingkungan, sarana dan prasarana fisik, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan demi kesejahteraan di masa depan.
2. Keterlibatan *stakeholders* dari beragam bidang aktivitas memungkinkan adanya pendekatan integrative dan holistik dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan *partnership* juga dapat membantu merefleksikan kesalingtergantungan antara pariwisata dan aktivitas lain.
3. Beragamnya *stakeholders* yang terlibat dalam proses penentuan kebijakan pariwisata memungkinkan lebih adilnya pendistribusian keuntungan dan biaya. Partisipasi juga memicu kepedulian dan kesadaran akan dampak pariwisata yang mungkin terjadi sehingga diharapkan melandasi pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.

4. Partisipasi yang luas dalam pembuatan kebijakan kepariwisataan dapat mendemokratisasi pengambilan keputusan, memberdayakan partisipan untuk memperkuat *capacity building* dan *skill acquisition* bagi mereka yang diwakili.

Dalam pengelolaan pariwisata peran pemangku kepentingan serta masyarakat itu sangat penting karena dengan adanya kerjasama yang antara pemerintah dan masyarakat maka proses pengelolaan juga akan berjalan dengan baik dan lancar dan tentunya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau para wisatawan. Sehingga potensi wisata yang disuguhkan pun dapat bermanfaat bagi para wisatawan yang datang maupun masyarakat lokal sebab secara tidak langsung dengan banyaknya para wisatawan yang datang tentu nya akan mempengaruhi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Berkaitan dengan penjelasan di atas pengelolaan disini terkait tentang pengelolaan Pemandian Batang Tabik di mana pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan kawasan wisata mempunyai peranan dan tanggung jawab penuh dalam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kawasan wisata Pemandian Batang Tabik agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud dan lingkungan tetap terjaga serta yang tidak kalah pentingnya yaitu dapat menarik para wisatawan yang ingin berkunjung.

Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai elemen yang saling berinteraksi dan memengaruhi. Pariwisata tidak hanya menyangkut bagaimana membangun dan mengelola suatu kawasan menjadi objek wisata, namun pengelolaannya harus mempertimbangkan prinsip berkelanjutan dan proteksi baik terhadap aspek ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Penawaran seperti taman wisata apa yang ingin dikembangkan contoh wisata alam, sarana rekreasi yang ditawarkan, penginapan yang disediakan untuk para wisatawan yang ingin menginap, serta aktivitas budaya yang ingin ditampilkan. Permintaan mengacu pada permintaan pasar pariwisata yaitu tipe wisatawan seperti apa yang akan disasar. Dalam hal ini menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran ini sangat penting dan merupakan kunci keberhasilan dan kesuksesan sebuah kawasan wisata.

Keseimbangan pariwisata juga harus memperhatikan antara biaya yang akan dikeluarkan serta keuntungan yang didapat dari dibukanya suatu kawasan wisata. Keseimbangan antar biaya dan keuntungan ini perlu di seimbangkan karena menjadi salah satu penentu keberlanjutan pariwisata. Sebab jika biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan keuntungan apa yang didapat maka besar kemungkinan wisata tersebut tidak akan bertahan lama, dan yang paling terpenting dalam pengelolaan pariwisata adalah keberadaan pariwisata hendaknya menyeimbangkan antara kepentingan kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan sekitar. Pariwisata diharapkan menyediakan metode untuk mengelola lingkungan yang lestari seperti dibukanya kawasan konservasi, pembaharuan sumber daya alam dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya konsep yang demikian diharapkan wisatawan yang berkunjung pun dapat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan kawasan wisata yang dikunjunginya. Oleh karena itu nilai-nilai lokal untuk mendukung kelestarian lingkungan dapat terjaga.

Liu dan Western dalam Pitana (2009:85) menyatakan bahwa pengelolaan pariwisata dapat berperan strategis untuk fungsi-fungsi berikut :

1. Perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan.

Umumnya pengembangan kawasan wisata akan diikuti oleh degradasi sumber daya yang diakibatkan oleh pertumbuhan dan pengembangan industri pariwisata yang ekstensif dan tidak terkendali, serta cepatnya pertumbuhan penduduk dikawasan tersebut sebagai konsekuensi logis dari kesempatan berusaha yang ditimbulkannya. Pariwisata jika dikelola dengan baik , mampu menyediakan solusi ekonomi untuk proteksi sumber daya alam dan lingkungan.

2. Keberlanjutan ekonomi

Kecendrungan industrialisasi dan perkembangan ekonomi global akan mengarah kepada kesalingtergantungan pada produk impor yang menguras devisa negara. Pengembangan pariwisata menjadi salah satu solusi masalah tersebut dengan menyediakan produk ekspor yang tidak lari kemana-mana sebagai sumber devisa. Pengembangan pariwisata juga menyediakan keuntungan ekonomi bagi lapisan masyarakat bawah yang umumnya berada di kawasan pedesaan sehingga diharapkan mampu menciptakan pendistribusian pendapatan dan sumber daya ekonomi yang menjadi lebih baik.

3. Peningkatan integritas budaya

Aspek ekologi dalam pariwisata yang menyiratkan sebuah hubungan timbal balik antara wisatawan dan komunitas lokal yang melibatkan dialog budaya yang berdasarkan penghormatan terhadap eksistensi dan integritas masing-masing. Jika elemen integritas budaya ini hilang maka dapat dipastikan

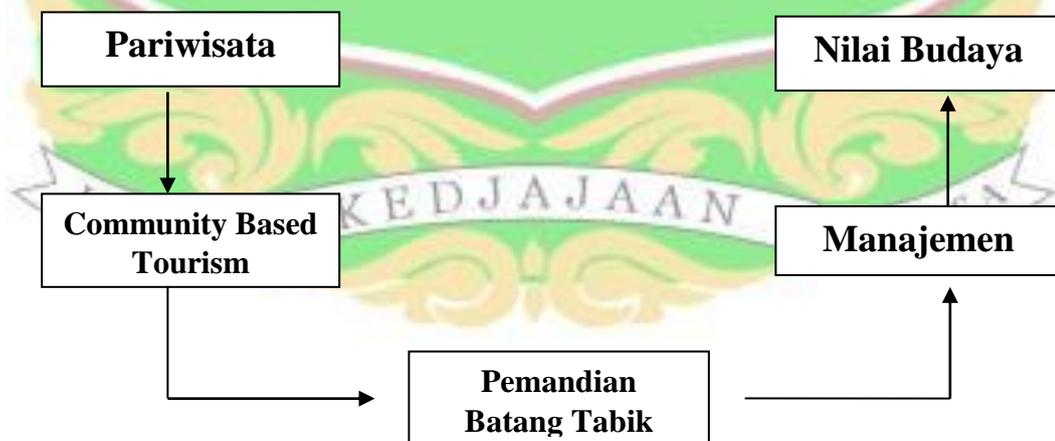
sebaik apapun kawasan wisata yang dibangun maka lambat laun akan ditinggalkan.

#### 4. Nilai pendidikan dan pembelajaran

Keberlanjutan dan kelestarian sebuah kawasan wisata tergantung kepada bagaimana membangkitkan pemahaman dan kepedulian semua pemangku kepentingan terhadap pentingnya kontribusi, eksistensi, dan perlindungan terhadap sumber daya pendukung pariwisata. Pemahaman dan kepedulian ini hanya bisa dicapai melalui proses penanaman tata nilai (*value*) dan norma (*norm*) melalui proses pendidikan dan pembelajaran.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas pariwisata ini mempunyai dampak terhadap lingkungan pada semua bentuk dan aspek pengembangannya. Pariwisata disini sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Bukan hanya untuk pemanfaatannya tetapi tanggung jawab yang diterima untuk tetap menjaga lingkungan pun harus terlaksana dengan baik dan dengan semestinya.

**Gambar 1**  
**Kerangka Konseptual**



## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:2), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu.

Menurut Denzin & Lincoln dalam Anggito (2018:7) Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode ini dilakukan dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu (1) menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*), dan (2) menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Dengan metode ini diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana Nagari dalam mengelola Wisata Pemandian Alam Batang Tabik sebagai salah satu wisata alam yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan di Kanagarian Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh dengan melihat pengelolaan Objek Wisata Pemandian Alam Batang Tabik. Lokasi ini dipilih karena peneliti melihat adanya proses pengelolaan yang berbeda dari pengelolaan pariwisata pada umumnya yang mana pariwisata ini melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan tempat wisatanya.

## 3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan seseorang yang dianggap mengetahui betul informasi yang terdapat di lokasi penelitian. Menurut Bungin (2011:133) informan ialah sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam rangka *cross check data*. Adapun informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Informan Kunci yaitu masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan Pemandian Batang Tabik dan wisatawan. Adapun informan kunci disini adalah tokoh masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan serta ketua organisasi pemuda yang ada di Nagari Sungai Kamuyang.
2. Informan Biasa yaitu pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pengelolaan Pemandian Batang Tabik serta masyarakat yang mengetahui secara umum pengelolaan wisata Pemandian Alam Batang Tabik.

Berikut tabel daftar informan kunci dan informan biasa yang merupakan sumber data primer dalam penelitian ini :

**Tabel 1**  
**Data Informan Penelitian**

No	Nama	Umur	Status	Kunci/biasa
1	Irmaizar	55 Tahun	Wali Nagari	kunci
2	Gaferi	56 Tahun	Datuak	kunci
3	Fadli	36 tahun	Ketua Pemuda	kunci
4	Paksi	26 Tahun	Pemuda Nagari	kunci
5	Chandra Eldi	45 Tahun	Pemuda Nagari	kunci
6	Mova	26 Tahun	Kepala Jorong dan pemuda nagari	kunci
7	Endriyani	57 Tahun	Pedagang	biasa
8	Alga	19 Tahun	Pemuda Nagari	biasa
9	Muhammad Akbar	19 Tahun	Pemuda dan anak nagari	biasa
10	Dirga	24 Tahun	Pemuda dan Anak Nagari	biasa
11	Alfredo	19 Tahun	Pemuda Nagari	biasa
12	Meslita	40 Tahun	Masyarakat setempat	kunci
13	Dandi	53 Tahun	Masyarakat Setempat	kunci
14	Ibu Siti	36 Tahun	Pengunjung	biasa
15	Danu	17 Tahun	Pengunjung	biasa

Sumber : Dokumentasi pribadi 2019

Cara pengambilan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan tujuan. *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2009:85) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut dilakukan agar data yang didapatkan saat penelitian nanti akan lebih akurat serta sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, sebab data yang didapat adalah data yang diperoleh langsung dari orang yang memahami betul permasalahan yang ada dilokasi penelitian.

Adapun kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Informan yang memiliki pengetahuan tentang Nagari Sungai Kamuyang dan Pemandian Batang Tabik.
- Informan yang mengetahui tentang tata cara atau sistem pengelolaan Wisata Pemandian Alam Batang Tabik.
- Informan sebagai pihak pengelola langsung Wisata Pemandian Alam Batang Tabik.
- Masyarakat umum yang mengetahui secara umum pengelolaan Wisata Pemandian Alam Batang Tabik
- Pedagang makanan di area Wisata Pemandian Batang Tabik sebagai orang atau masyarakat yang tergabung dalam upaya pengelolaan Wisata Pemandian Batang Tabik yang berdampak terhadap mata pencaharian mereka.
- Petugas TIM SAR sebagai masyarakat umum yang paham tentang Pemandian Batang Tabik dan sedikit banyaknya mereka mengetahui pengelolaan Wisata Pemandian Alam Batang Tabik.
- Petugas karcis sebagai orang yang merasakan langsung dampak dari proses pengelolaan yang mereka kerjakan. Secara tidak langsung dampak tersebut berkaitan dengan sistem pendapatan mereka.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **4.1 Observasi atau pengamatan**

Observasi yaitu pengamatan secara langsung dimana peneliti melihat, mencatat perilaku atau kejadian di lapangan. Menurut Angrosino dalam Creswell (2015:231) observasi atau pengamatan adalah memperhatikan fenomena di

lapangan melalui kelima indra peneliti, sering kali dengan instrumen atau perangkat, dan merekamnya untuk tujuan ilmiah. Pengamatan merupakan salah satu alat penting untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Dengan melakukan observasi peneliti dapat melakukan pengamatan terhadap pengelolaan wisata sesuai data yang peneliti butuhkan serta untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari suatu penelitian. Selain itu pengamatan juga bertujuan untuk melihat secara langsung realitas yang terjadi terhadap subjek penelitian ataupun realitas lain yang terjadi dilokasi penelitian.

#### 4.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan antara lain Wali Nagari, pihak pengelola serta masyarakat yang mengetahui secara umum permasalahan yang diteliti, dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan informan dengan tujuan untuk mengetahui data yang mungkin tidak didapat saat melakukan observasi. wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode *observasi* (pengamatan). Walaupun sudah dibantu oleh banyak asisten dalam melakukan observasi secara bergiliran, tidak pernah dapat meliputi seluruh aktivitas semua warga dalam suatu masyarakat di suatu tempat, terus-menerus selama 24 jam dari hari ke hari. Itulah sebabnya lowongan dalam data yang tidak dapat dicatat dari observasi harus diisi dengan data yang di dapat dari wawancara (Paul 1953:441-

442; Koentjaraningrat 1986a:29). Melalui wawancara peneliti dapat menggali informasi yang lebih dalam yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik dalam pengambilan data. Teknik ini dilakukan dengan cara perekaman dalam bentuk pengambilan gambar dan video sebagai penguat data yang didapat dari lokasi penelitian. Selain itu dengan pengambilan data ini peneliti dapat menganalisis data dan data yang didapat pun akan lebih akurat. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

#### 4.4 Studi kepustakaan

Penulis menggunakan studi kepustakaan untuk memperkaya informasi yang lebih banyak tentang pengelolaan pariwisata dengan mencari bahan bacaan berupa buku, jurnal, serta skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Jenis data dari teknik pengumpulan data ini adalah :

##### 1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan. Sebagaimana dijelaskan oleh Hasan (2002:82) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.

##### 2. Data Sekunder

Menurut Hasan (2002:58) Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang

telah ada. Data sekunder diambil dari dokumen-dokumen yang ada di kantor Wali Nagari Sungai Kamuyang.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dalam menemukan maksud dari hasil penelitian. Proses analisis data melibatkan pengorganisasian data, pembacaan pendahuluan pada *database*, pengodean dan pengorganisasian tema, penyajian data, dan penyusunan penafsiran data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data (yaitu, data teks seperti transkrip, atau data gambar seperti foto) untuk analisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengkodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel atau pembahasan (Creswell, 2015:251).

Analisis data dimulai dengan peneliti menulis catatan yang ditemukan saat di lapangan seperti data observasi, dan data yang di dapat saat melakukan wawancara secara mendalam. Jika data berbentuk rekaman maka peneliti akan mentranskripkan data terlebih dahulu agar data mudah dipahami dalam bentuk bacaan. Kemudian setelah keseluruhan data ditulis ulang dengan rapi, peneliti akan melanjutkan ke proses analisis data dimana proses ini adalah proses pengelompokan data ke dalam klasifikasi yang sudah di tetapkan berdasarkan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Kemudian dilanjutkan ke tahap perbandingan data dengan aspek-aspek yang

dijelaskan pada kerangka pemikiran. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk laporan tertulis.

#### **H. Jalannya Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini dimulai dengan tahap pembuatan proposal dengan merancang sebuah tema proposal yang akan menjadi laporan skripsi. Setelah menentukan tema dan pembuatan proposal yang ingin diteliti maka akan dilanjutkan ke tahap proses penelitian setelah proposal yang diajukan sudah dinyatakan lulus pada tanggal 23 Mei 2019. Proses penelitian dilakukan mulai awal bulan juni hingga akhir bulan juli. Pada saat penelitian yang pertama peneliti lakukan adalah meminta data sekunder pada BAB II mengenai gambaran umum lokasi penelitian kepada kantor wali nagari.

Setelah data umum didapatkan peneliti memilih beberapa informan sesuai kriteria informan yang sudah dijelaskan pada BAB I. Peneliti melanjutkan ke tahap wawancara bersama informan. Wawancara dilakukan dengan lancar. Peneliti juga menggunakan alat perekam saat melakukan wawancara. Hal tersebut dilakukan agar hasil wawancara yang peneliti dapatkan akan lebih konkrit. Saat melakukan wawancara semua informan yang peneliti wawancarai bersedia untuk diwawancarai sehingga proses penelitian tidak menyulitkan peneliti. Setelah proses penelitian dilakukan diperoleh berbagai data dan semua data yang peneliti inginkan untuk menjawab rumusan masalah dapat terkumpul dengan baik dan lancar. Pada akhir bulan juli proses penelitian selesai dan dilanjutkan ke tahap penulisan ke dalam bentuk laporan skripsi.